



LAPORAN

PELAYANAN

PENGADUAN MASYARAKAT

PERIODE TAHUN 2019

**PUSAT INFORMASI & KOMUNIKASI
SUB BAGIAN HUMAS & TATA USAHA KEPALA PERWAKILAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



LAPORAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2019

Salah satu kegiatan Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah menerima dan memberikan layanan terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK menanganinya dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK.

Pengaduan dari masyarakat mengindikasikan bahwa BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabilitas dan transparan yang bersih, bebas dari KKN. Pengaduan ini bisa disampaikan secara langsung, email/surat maupun melalui website. Isi dari pada pengaduan masyarakat ini bermacam-macam, dimana mayoritas menghendaki agar segala bentuk kecurangan yang terjadi yang menyangkut pengelolaan keuangan negara harus dibenahi.

Tujuan dari laporan ini adalah mendapatkan masukan dan informasi tentang segala sesuatu yang disampaikan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat serta untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK, terutama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

**RESUME ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT
DI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2019**

No	KLASIFIKASI	URAIAN
1.	Saluran	Jumlah : 8
	a) Website	:
	b) Surat/Email/Telepon	: 8
	c) Langsung	:
2.	Leading Topik	
	Pengaduan Masyarakat	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyimpangan Kerugian Negara/Daerah ➤ Permasalahan Lahan PLTD Sambaliung ➤ Penyalahgunaan Aset Negara ➤ Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3.	Topik yang perlu mendapat perhatian	
	Pengaduan Masyarakat	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informasi adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah ➤ Sengketa Lahan di PLTD Sambaliung ➤ Penyalahgunaan Penggunaan Kendaraan Dinas ➤ Dilakukan pemeriksaan BPK yang sudah tidak menjabat dan masih diberikan gaji, penyalahgunaan Alat Pertanian. ➤ Dimohon melakukan pemeriksaan terhadap anggaran dimana ada indikasi kecurigaan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh KPA, PPTK dan staf PPTK

I. SALURAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang berasal dari publik eksternal BPK dapat disalurkan melalui beberapa saluran pengaduan yakni website, surat/e-mail/telepon, ataupun datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur) yang beralamat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin No.19 Samarinda.

Pada bulan Januari s.d Desember 2019, analisis kuantitatif pengaduan masyarakat di BPK melalui saluran website, surat/email/telepon, maupun datang langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persentase Saluran Pengaduan Masyarakat

No	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website	0	0%
2	Surat/Email/Telepon	8	100%
3	Langsung	0	0%
	JUMLAH	8	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 8 pengaduan masyarakat yang masuk pada bulan Januari s.d Desember 2019.

II. TOPIK PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan ke dalam topik pengaduan yang terkait dengan pemeriksaan yaitu permohonan pemeriksaan, informasi permasalahan penyimpangan keuangan negara/daerah dan laporan hasil pemeriksaan, serta pengaduan yang terkait dengan non pemeriksaan yaitu kepegawaian/SDM, informasi BPK yang dipublikasikan, dan lain-lain.

Selama bulan Januari s.d Desember 2019 pengaduan masyarakat yang masuk diklasifikasikan berdasarkan topik sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persentase Topik Pengaduan Masyarakat

No	Topik	Jumlah	Persentase
	Pemeriksaan		
1	Permohonan Pemeriksaan	2	0%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	9	100%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	0	0%
	Non Pemeriksaan		
4	Kepegawaian/ SDM	0	0%
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	0	0%
6	Lain-lain	1	0%
	JUMLAH	12	100%

Pengaduan masyarakat yang masuk pada bulan Januari s.d Desember 2019 ada 12 dengan topik permohonan pemeriksaan dan penyimpangan keuangan Negara/daerah.

III. TANGGAPAN TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT

Terdapat 12 pengaduan masyarakat pada bulan Januari s.d Desember 2019.

Adapun analisis kuantitatif pengaduan masyarakat yang ditanggapi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tanggapan Atas Pengaduan Masyarakat

No	Topik	Jml	Yang Ditanggapi Oleh Subbag Hukum	Yang Diteruskan Ke Satker	Trash
	Pemeriksaan				
1	Permohonan Pemeriksaan	2	0	2	0
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	9	0	9	0
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	0	0	0	0
	Non Pemeriksaan				
4	Kepegawaian/ SDM	0	0	0	0
5	Informasi BPK yang dipublikasikan	0	0	0	0
6	Lain-lain	1	0	1	0
	JUMLAH	12	0	12	0

IV. TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yaitu sebagai bahan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan LKPD.

Demikian Laporan Pengaduan Masyarakat ini dibuat dengan harapan hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Samarinda, 4 Januari 2020
Kasubag Humas dan TU Kalan


Surya Satya Darma
NIP 198008132008081001